

ANALISIS DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS PADA 6 NEGARA ASEAN)

SKRIPSI

Disusun oleh :

**Ulvianingrum Sholekhah
145020100111037**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

ANALYSIS ON THE DETERMINANTS OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX (A CASE STUDY IN SIX ASEAN COUNTRIES)

THESIS

By:

**Ulvianingrum Sholekhah
145020100111037**

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Attainment of the Degree of Bachelor of Economics**



**DEPARTMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


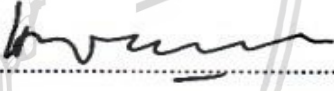

**"Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia
(Studi Kasus Pada 6 Negara ASEAN)"**

Yang disusun oleh :

Nama : Ulvianingrum Sholekhah
NIM : 145020100111037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Nurul Badriyah, SE., ME.
NIP. 19740302 200501 2 001
(An. Jurusan IE) 
2. Dr. Iswan Noor, SE., ME.
NIP. 19590710 198303 1 004
(Dosen Penguji I) 
3. Puspitasari Wahyu Anggraeni,
SE., M.Ec.Dev
NIK. 201405 870703 1 2 001
(Dosen Penguji II) 

Malang, 15 Agustus 2018
Ketua Program Studi



Marlina Ekawaty, SE., MSi., Ph. D
NIP 19650311 198903 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia
(Studi Kasus pada 6 Negara ASEAN)**

Yang disusun oleh :

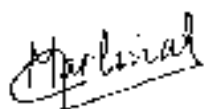
Nama : Ulvianingrum Sholekhat
NIM : 145020100111037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Matang, 10 Juli 2018
Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,



Marlina Ekawaty, Ph.D
NIP. 198503 198903 2 001



Prof. Candra Fajri Ananda
NIP. 19641029 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ulvianingrum Sholekhah
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 21 Oktober 1998
NIM : 145020100111037
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan
Alamat : Jl. Warinot 114 Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia
(Studi Kasus pada 6 Negara ASEAN)**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar keserjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Prof. Candra Fajri Ananda
NIP. 19641029 198903 1 001

Malang, 10 Juli 2018

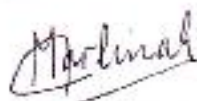
Yang membuat pernyataan,



Ulvianingrum Sholekhah

NIM. 145020100111037

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Marlina Ekawaty, SE., MSi., Ph. D
NIP 19650311 198903 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ulvianingrum Sholekhah
 Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 21 Oktober 1996
 Alamat : Jl. Warinoi 114 Malang
 Telephone/HP : 085649586383
 Email : ulvianingrum.sholekhah@gmail.com
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Motto : “Jangan Sampai Ada Dan Tiadamu Di Dunia
 Tidak Ada Bedanya”

Riwayat Pendidikan

1. SDN Tulusrejo 2 Malang (2002 – 2008)
2. SMPN 5 Malang (2008 – 2011)
3. SMAN 4 Malang (2011 – 2014)
4. S1 FEB UB (Jurusan Ilmu Ekonomi) (2014 - saat ini)

Pengalaman Kepanitiaan

1. Staff Humas & Dana English Writing Workshop (ICOSH FEB UB)(2014)
2. Staff Humas & Dana Workshop of English Public Speaking
(ICOSH FEB UB) (2014)
3. Staff Humas Raja Brawijaya (EM UB) (2016)
4. Koordinator LO English Fair (ICOSH FEB UB) (2016)
5. Koordinator Humas Beyond (EM UB) (2016)
6. Sekretaris BTF SMP (IFL Chapter Malang) (2016)
7. Sekretaris We Care Them 2016 (IFL Chapter Malang) (2016)

Pengalaman Organisasi

1. Staff Magang Departemen MBP HMJIE (2014 - 2015)
2. Staff Departemen Kesekretariatan IFL Chapter Malang (2015 - 2016)

Pengalaman Kerja

1. Magang di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan (4 September 2017 – 10 Oktober 2017).

ANALYSIS ON THE DETERMINANTS OF HUMAN DEVELOPMENT

INDEX

(A CASE STUDY IN SIX ASEAN COUNTRIES)

Ulvianingrum Sholekah

Faculty of Economic and Business Brawijaya University

Email: ulvianingrum.sholekhah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the human development index in some ASEAN countries. This study was conducted with sample of 6 ASEAN countries, namely Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, Laos and Cambodia in the period 2000 to 2015. The analysis technique used is panel data regression with fixed effect model. The results showed that GDP per capita, government expenditure on education, and government expenditure on health sector had a positive and significant effect on human development index. While the unemployment rate has a negative and insignificant effect on human development index.

Keywords: Human Development Index, ASEAN, Panel Regression

Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia

(Studi Kasus Pada 6 Negara ASEAN)

Ulvianingrum Sholekah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: ulvianingrum.sholekhah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di beberapa negara ASEAN. Penelitian ini dilakukan dengan sample 6 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos dan Kamboja pada periode 2000 hingga 2015. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP per kapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, ASEAN, Regresi Panel

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 6 Negara Asean)”**. Penyusunan skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. Atas dukungan moral dan materiil yang diberikan dalam penyusunan makalah ini, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis selama hidup di dunia ini.
2. Bapak Hadi Budiman, Ibu Tutik Widyawati, dan Dwi Cahya Ramadani selaku orangtua dan adik dari penulis, yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti dan doa yang selalu mengiringi. Keluarga besar penulis yang memberikan doa dan dukungan selama pengerjaan skripsi hingga selesai.
3. Bapak Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.
4. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Ibu Dr. Nurul Badriyah, SE.,ME. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
6. Teman – teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna mengevaluasi penulisan skripsi ini. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak..

Malang, 07 Agustus 2018

Ulvianingrum Sholekhah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
HALAMAN RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
 BAB II LANDASAN TEORI	 13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Konsep Pembangunan Berbasis Sumber Daya Manusia	13
2.1.2 Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Perekonomian	21
2.1.2.1 Barang Publik bagi Pembangunan	23
2.1.2.2 Efisiensi Barang Publik	24

2.1.2.3 Pembiayaan Barang Publik	26
2.1.2.4 Kontribusi Pengeluaran Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	27
2.1.2.5 Teori Pengeluaran Pemerintah	27
2.1.3 Pengangguran	31
2.1.3.1 Teori-Teori Pengangguran	34
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pengangguran	35
2.1.3.3 Akibat Pengangguran	39
2.2 Hubungan Antar Variabel	41
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan IPM	41
2.2.2 Hubungan GDP per Kapita dan IPM	43
2.2.3 Hubungan Pengangguran dan IPM	44
2.3 Penelitian Terdahulu	46
2.4 Kerangka Pikir	52
2.5 Hipotesis Penelitian	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Sample dan Waktu Penelitian	56
3.3 Jenis dan Sumber Data	57
3.4 Metode Pengumpulan Data	57
3.5 Model Umum Penelitian	58
3.6 Teknik Analisis Data	59
3.6.1 Menyiapkan Data	59
3.6.2 Menentukan Persamaan	59
3.6.3 Menentukan Model Terbaik	59

3.6.4 Uji Asumsi Klasik	62
3.6.5 Uji Statistik	64
3.7 Definisi Operasional Variabel	68
3.7.1 Indeks Pembangunan Manusia	68
3.7.2 Pengeluaran Pemerintah	69
3.7.3 <i>GDP</i> per Kapita	69
3.7.4 Pengangguran	69
BAB IV HASIL PENELITIAN	71
4.1 Gambaran Umum	71
4.1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	71
4.1.2 Perkembangan Pendapatan Per Kapita	73
4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	74
4.1.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	77
4.1.5 Perkembangan Pengangguran	77
4.2 Hasil Estimasi dan Pengujian Hipotesis	78
4.2.1 Menentukan Model Terbaik	78
4.2.1.1 Hasil Uji Chow	79
4.2.1.2 Hasil Uji Hausman	79
4.2.2 Hasil Uji Kriteria Statistik	79
4.2.2.1 Hasil Uji Signifikansi Serentak (<i>F-test</i>)	79
4.2.2.2 Hasil Uji Signifikansi Parsial (<i>t-test</i>)	80
4.2.2.3 Hasil Uji Goodness of Fit (<i>R-squared</i>)	81
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	81
4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas	82
4.2.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	82
4.2.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	82

4.2.3.4 Hasil Uji Autokorelasi	83
4.3 Pembahasan	83
4.3.1 Pengaruh GDP Per Kapita terhadap IPM	83
4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM	84
4.3.3 Pengaruh Pengangguran terhadap IPM	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Negara-Negara ASEAN	5
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Perkembangan GDP per Kapita di 6 Negara ASEAN	3
Gambar 1.2 : Perkembangan Pengeluaran Pemerintah per Kapita (Pendidikan & Kesehatan) di Beberapa Negara ASEAN	7
Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian	52
Gambar 4.1 : Perkembangan IPM di Beberapa Negara ASEAN	73
Gambar 4.2 : Perkembangan Pendapatan Per Kapita di Beberapa Negara ASEAN	74
Gambar 4.3 : Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan per Kapita di Beberapa Negara ASEAN	76
Gambar 4.4 : Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan per Kapita di Beberapa Negara ASEAN	77
Gambar 4.5 : Perkembangan Pengangguran di Beberapa Negara ASEAN	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Uji Chow	94
Lampiran 2 : Hasil Uji Hausman	94
Lampiran 3 : Hasil Fixed Effect	95
Lampiran 4 : Hasil Uji Normalitas	95
Lampiran 5 : Hasil Uji Multikolinearitas	96
Lampiran 6 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	96
Lampiran 7 : Hasil Uji Autokorelasi	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

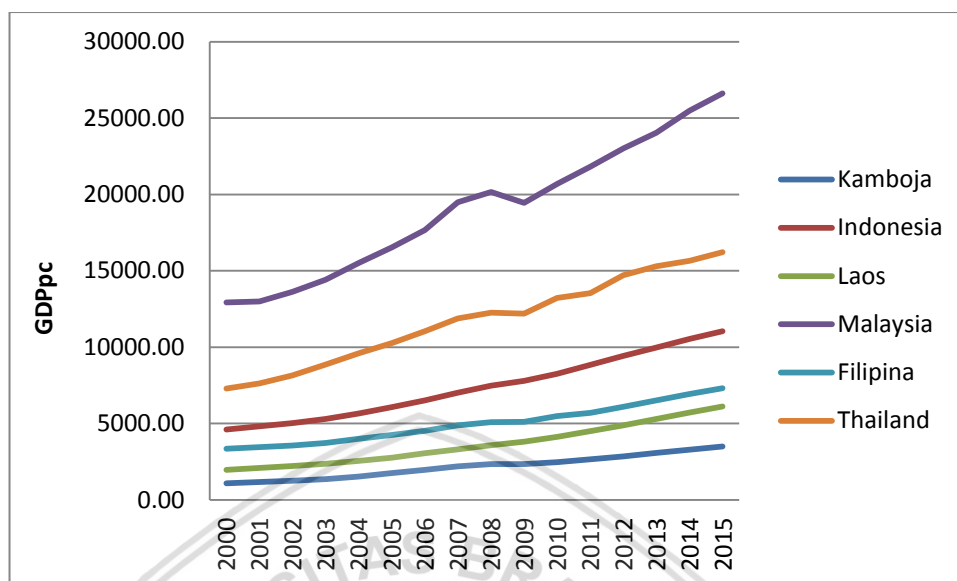
ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama antar negara di Asia Tenggara sejak 1967. ASEAN memiliki 10 negara anggota, antara lain Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. ASEAN didirikan bermula dari hasrat untuk menciptakan kawasan yang damai, negara-negara penandatangan Deklarasi Bangkok menginginkan kerja sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial-budaya, serta perdamaian dan stabilitas di kawasan dalam wadah ASEAN (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 2011).

Tujuan ASEAN adalah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Selain itu, ASEAN menciptakan kerja sama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan di kawasan. ASEAN juga ingin menciptakan penguatan demokrasi, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, serta penciptaan lingkungan yang aman dari narkoba. Selain itu, ASEAN mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ASEAN juga memajukan identitasnya dengan meningkatkan

kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan, serta meneruskan peran proaktif ASEAN dalam kerja sama dengan negara mitra wicara, yaitu negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra kerja sama ASEAN di berbagai bidang. Tujuan ASEAN yang paling penting adalah pengurangan kesenjangan pembangunan ekonomi di kawasan (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 2011)..

Untuk mewujudkan tujuan ASEAN, maka digunakan beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan di setiap negara ASEAN. Indikator yang digunakan antara lain indikator ekonomi dan juga indikator sosial atau kesejahteraan. Indikator ekonomi sudah sejak lama digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan suatu negara. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, ukuran ekonomi saja tidak cukup untuk menjelaskan pembangunan suatu negara, sehingga diperlukan indikator lain yang menjelaskan mengenai pencapaian sosial masyarakatnya.

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai pembangunan suatu negara dari sisi ekonomi adalah pertumbuhan GDP per kapita. Pertumbuhan GDP per kapita merupakan selisih nilai antar GDP per kapita setiap tahunnya. Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan GDP per kapita pada beberapa negara ASEAN sejak 2000 hingga 2015.

Gambar 1.1 : **Perkembangan GDP per Kapita di Beberapa Negara ASEAN**

Sumber : World Bank, 2018

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan GDP per kapitapada beberapa negara ASEAN. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa GDP per kapita di negara-negara ASEAN selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, masih terdapat *gap* yang cukup besar di antara negara-negara tersebut. Malaysia merupakan salah satu negara dengan GDP per kapita yang paling tinggi. Sedangkan Kamboja menempati urutan terbawah dalam hal GDP per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembentukan ASEAN untuk mengurangi ketimpangan antar-negara belum cukup berhasil, jika dilihat dari ketimpangan GDP per kapita antar-negara.

Selain dilihat dari sisi ekonomi, diskusi tentang pembangunan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan GDP per kapita saja. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan multi-dimensi yang mencakup berbagai aspek lain, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan. Pembangunan ekonomi merupakan proses peningkatan pendapatan per kapita disertai dengan

perubahan dan perbaikan kelembagaan. Oleh karena itu, dalam mengukur pembangunan ekonomi, ternyata tidak cukup untuk berbicara hanya pertumbuhan GDP per kapita. Akan tetapi juga harus membahas masalah sosial perubahan struktur, sistem kelembagaan, perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang juga menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi. Sarkar dkk (2012) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan salah satu pertimbangan penting dari tingkat pembangunan suatu negara. Pembangunan manusia adalah tentang memperbesar pilihan orang dengan berbagi sumber daya alam (Eren et al., 2014).

Salah satu indikator dari pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia. IPM menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu negara. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks pendidikan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, indeks kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup, serta indeks daya beli yang diukur melalui paritas daya beli. Tabel 1.1 merupakan tabel yang menjelaskan mengenai perkembangan indeks pembangunan manusia di negara-negara ASEAN.

Tabel 1.1 : Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara ASEAN

No	Negara	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Singapura	0.887	0.889	0.911	0.917	0.92	0.922	0.924	0.925
2	Brunei	0.841	0.845	0.846	0.852	0.86	0.863	0.864	0.865
3	Malaysia	0.756	0.764	0.774	0.776	0.779	0.783	0.787	0.789
4	Thailand	0.706	0.711	0.72	0.729	0.733	0.737	0.738	0.74
5	Indonesia	0.654	0.656	0.662	0.669	0.677	0.682	0.686	0.689
6	Myanmar	0.504	0.515	0.526	0.533	0.54	0.547	0.552	0.556
7	Filipina	0.661	0.662	0.669	0.666	0.671	0.676	0.679	0.682
8	Kamboja	0.52	0.519	0.533	0.54	0.546	0.553	0.558	0.563
9	Vietnam	0.641	0.647	0.655	0.662	0.668	0.675	0.678	0.683
10	Laos	0.525	0.535	0.542	0.554	0.563	0.573	0.582	0.586

Sumber: UNDP, 2016

Tabel 1.1 di atas menjelaskan mengenai perkembangan indeks pembangunan manusia di negara-negara ASEAN sejak 2008 hingga 2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia di negara-negara ASEAN mengalami peningkatan setiap tahunnya. Singapura menempati urutan teratas dan masuk kedalam golongan negara dengan indeks pembangunan manusia sangat tinggi. Sedangkan Myanmar menempati urutan terbawah dengan nilai indeks pembangunan manusia paling kecil. Besarnya perbedaan nilai IPM antarnegara di ASEAN menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya ASEAN belum tercapai, karena masih adanya kesenjangan kesejahteraan.

Kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan antarnegara di kawasan ASEAN perlu untuk dihilangkan. Apalagi sejak mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) penting untuk tiap negara dalam kawasan ASEAN agar dapat menyamakan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu

indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia adalah dengan menggunakan IPM. Maka dari itu, untuk dapat menyamakan kualitas sumber daya manusia, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi IPM. Ketika faktor-faktor yang mempengaruhi sudah diketahui, maka akan lebih mudah bagi suatu negara untuk meningkatkan nilai indeks pembangunan manusianya agar dapat mengurangi kesenjangan antar-negara di kawasan ASEAN.

Untuk menurunkan kesenjangan tersebut, peran pemerintah dalam pembangunan suatu negara menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan mekanisme pasar yang menjadi andalan kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah, sudah tidak efektif lagi karena banyaknya krisis ekonomi yang terjadi. Aliran Keynesian telah memprediksi munculnya krisis ekonomi dengan argumen bahwa pasar tidak akan mampu menyelesaikan masalah permintaan dan penawaran. Aliran ini berpendapat bahwa suatu saat pasar akan mengalami ketidakseimbangan karena gagalnya mempertemukan permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya peran negara dalam mengatasi hal tersebut (Widodo, 2011).

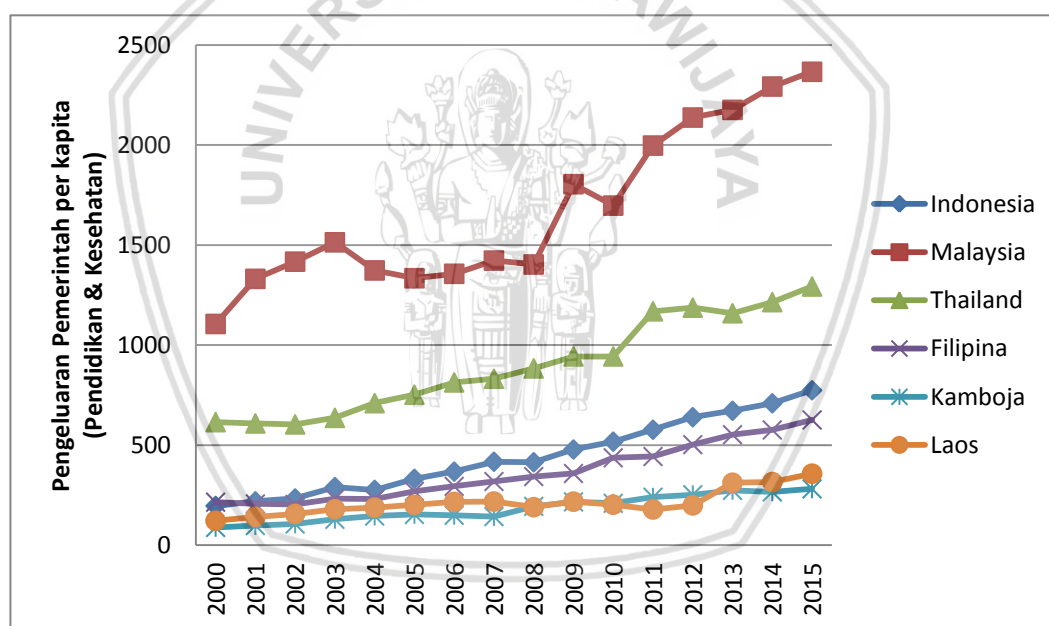
Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat dilihat dari regulasi dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Regulasi diperlukan untuk mengatur seluruh pelaku ekonomi khususnya swasta agar selalu berada dalam kondisi perekonomian yang diinginkan. Selain itu, kebijakan fiskal yang diimplementasikan dalam bentuk anggaran pemerintah menjadi alat untuk membiayai semua kegiatan pemerintah dan penyediaan barang publik dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mangkoesoebroto (2001), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu

kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut.

Sektor pengeluaran pemerintah yang memiliki peranan besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan pengeluaran pemerintah per kapita bidang pendidikan dan kesehatan pada beberapa negara ASEAN.

Gambar 1.2 : **Perkembangan Pengeluaran Pemerintah per Kapita (Pendidikan & Kesehatan) di Beberapa Negara ASEAN**



Sumber : World Bank, 2018

Gambar 1.2 menjelaskan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah per kapita pada beberapa negara ASEAN. Pengeluaran pemerintah ini merupakan pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan. Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah di kawasan ASEAN memiliki kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Pengeluaran

pemerintah tertinggi dikeluarkan oleh negara Malaysia. Sedangkan negara yang mengeluarkan pengeluaran pemerintah terendah merupakan negara Kamboja dan Laos. Dapat dilihat bahwa semakin banyak pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia di negara tersebut.

Setelah melihat bagaimana perkembangan indeks pembangunan manusia di kawasan ASEAN, para peneliti mulai mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi IPM. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arisman (2018) yang berjudul *Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi IPM di ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia pada negara anggota ASEAN. Sedangkan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

Penelitian lain dilakukan oleh Winarti (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap IPM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Lalu, variabel PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Sedangkan variabel anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu bahwa IPM tidak hanya dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro (pertumbuhan GDP, kemiskinan, pengangguran) akan tetapi juga dipengaruhi oleh peranan pemerintah (pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi IPM di ASEAN, baik dari segi ekonomi makro (GDP per kapita dan pengangguran) maupun dari peran pemerintah (pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan). Sehingga pada penelitian ini didapatkan judul **“Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada 6 Negara ASEAN)”**

1.2 Rumusan Masalah :

Permasalahan pembangunan manusia di ASEAN adalah berkaitan dengan naiknya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta GDP yang meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan kenaikan pembangunan manusia yang tercermin dari nilai IPM yang masih rendah. Selain itu, dalam periode pertumbuhan yang pesat juga terdapat penurunan dalam proporsi pengangguran di ASEAN. Meskipun demikian, peningkatan pembangunan manusia masih lambat seiring dengan terjadinya penurunan proporsi pengangguran sehingga capaian IPM di negara-negara ASEAN masih tergolong rendah.

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh GDP per kapita terhadap IPM di negara-negara ASEAN??
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM di negara-negara ASEAN?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap IPM di negara-negara ASEAN?
4. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap IPM di negara-negara ASEAN??

1.3 Tujuan Penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh GDP per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di negara-negara ASEAN
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara-negara ASEAN
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di negara-negara ASEAN
4. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di negara-negara ASEAN

1.4 Sistematika Penulisan :

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Analisis, serta Penutup. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan yang menjelaskan estimasi serta interpretasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran

yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Bagian ini menjabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam penelitian ini.

2.1.1 Konsep Pembangunan Berbasis Sumber Daya Manusia

Pada awalnya, pembangunan diarahkan hanya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai proxy kesejahteraan suatu negara. Namun kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Hal ini khususnya terjadi pada negara berkembang. Pada *World Development Report* yang terbit pada tahun 1991, Bank Dunia menyatakan bahwa “Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama dinegara-negara yang paling miskin, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan pendapatan yang lebih tinggi. Namun yang dibutuhkan bukan hanya itu, pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu ciri dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang harus diperjuangkan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individu, dan pelestarian ragam kehidupan budaya” (Todaro, 2006).

Todaro (2006) mengatakan bahwa, sesuai pernyataan Bank Dunia, pembangunan merupakan proses multidimensional yang memiliki cakupan luas

bukan hanya semata untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun mencakup juga struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional dengan tetap memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 tujuan utama dari pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan yang pokok, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pembangunan manusia merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk dapat mencapai pembangunan di segala bidang pada negara tersebut. Sumber daya yang baik dan memadai akan mampu mendorong pertumbuhan dan pembangunan pada berbagai sektor. Karena manusia merupakan subjek dan objek dalam proses pembangunan sebuah bangsa, maka diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya negara dengan tingkat

pertumbuhan tinggi, akan tetapi gagal dalam menghadapi kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya "*Global Human Development Report*" memperkenalkan konsep "Pembangunan Manusia (*Human Development*)" sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia didefinisikan sebagai perluasan pilihan bagi manusia (*enlarging people's choices*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Berdasarkan kalimat tersebut, UNDP secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (BPS, 2012). Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat dipersentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan dipersentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata

lamanya sekolah, sementara dimensi kehidupan yang layak dipersentasikan oleh indikator kemampuan daya beli (BPS, 2012).

Sebagaimana laporan yang dikeluarkan UNDP (1995), ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia yaitu sebagai berikut :

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut UNDP dalam *Human Development Report* (HDR) 1995 yang menekankan bahwa untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep pembangunan manusia harus dibangun dari empat dimensi yang tidak terpisahkan. Berdasarkan konsep di atas maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur pokok yang perlu diperhatikan (UNDP 1995) yaitu:

a. Produktivitas (*Productivity*)

Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan (*equity*)

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada.

c. Kestinambungan (*Sustainability*)

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua jenis pemodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi.

d. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

2.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum adanya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai ukuran pembangunan ekonomi, terlebih dahulu digunakan PQLI (Physical Quality of Life Index). PQLI mencoba untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan di

suatu negara. Nilainya diukur dari 3 kriteria, yaitu melek huruf, kematian bayi, dan tingkat harapan hidup saat usia 1 tahun, semua diukur menggunakan skala 0 – 100. PQLI digagas oleh Dewan Pengembangan Luar Negeri (Overseas Development Council) pada pertengahan 1970 oleh David Morris, sebagai bentuk ketidakpuasan atas penggunaan GNP sebagai indikator pembangunan suatu negara. Lalu dikritisi karena overlap antara kematian bayi dan harapan hidup pada usia 1 tahun (Abraham, 2015).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali dikenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikembangkan oleh Amartya Sen (pemenang nobel asal India) dan Mahbub ul Haq (ekonom asal Pakistan), yang dibantu oleh Gustav Ranis (Yale University) dan Lord Meghnad desai (London School of Economics). IPM dibuat untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuannya harus menjadi tujuan utama dari pembangunan suatu negara, bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonominya saja. IPM dibentuk dari 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kesehatan diukur dari tingkat harapan hidup. Pendidikan diukur dari lama waktu bersekolah. Dan tingkat hidup layak diukur dari GDP per kapita (Arisman, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk

mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Karena hanya mencakup 3 komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan. Semakin dekat nilai IPM dengan angka 1, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan untuk sasaran tersebut.

Terdapat 3 komponen penyusun indeks pembangunan manusia, yaitu :

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang mengukur *longevity* (panjang umur) dari seseorang di suatu wilayah atau negara. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (187 negara didunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP.

b. Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 1 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.

c. Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan.

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X(i,j) = \frac{(X(i,j) - X(i-\min))}{(X(i-\max) - X(i-\min))}$$

Dimana :

$X(i,j)$ = Indeks komponen ke-i dari daerah j

$X(i-\min)$ = Nilai minimum dari X_i

$X(i-\max)$ = Nilai maksimum dari X_i

Setelah menghasilkan angka IPM, setiap tahunnya PBB memeringkat semua negara yang secara keseluruhan bisa dikategorikan kedalam 4 kelompok besar, yaitu :

1. Negara dengan tingkat pembangunan manusia rendah (< 0,550)
2. Negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (0,550 – 0,699)
3. Negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi (0,700 – 0,799)
4. Negara dengan tingkat pembangunan manusia sangat tinggi (>0,800)

Namun, perlu dicatat bahwa setiap tahunnya IPM hanya mengukur tingkat-tingkat pembangunan manusia relatif, bukan absolut, dan fokusnya adalah pada hasil pembangunan (ketahanan hidup, pengetahuan, dan kebebasan pilihan materi atau kualitas standar hidup) bukannya sarana yang semata-mata melihat pendapatan (Todaro, 2006).

2.1.2 Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Perekonomian

Pandangan ekonom tentang peranan negara dalam perekonomian sangat beragam. Secara garis besar, perbedaan ini dijelaskan dalam 4 aliran dan pendekatan (Caporaso, 1992). Yang pertama adalah, sistem ekonomi liberal sebagai penganut aliran ekonomi klasik, yang tokohnya adalah Adam Smith, menyatakan bahwa perekonomian harus selalu mengikuti mekanisme pasar. Peran pemerintah sangat minimal, yaitu menjaga agar mekanisme pasar berjalan

dengan baik melalui jaminan atas hak kepemilikan. Legalisasi hak kepemilikan sangat penting sebagai dasar terjadinya transaksi. Pemerintah harus menjamin agar pihak-pihak yang tidak terlibat dalam transaksi tidak mendapat manfaat ataupun beban dari transaksi tersebut (eksternalitas). Pemerintah dengan sistem ekonomi liberal harus memberikan dukungan kepada setiap warga negara agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Yang kedua, aliran Marxisme, yang tokohnya Karl Marx, berpendapat bahwa semua urusan perekonomian dikerjakan oleh pemerintah. Warga negara tidak diberikan kekuasaan dalam menjalankan perekonomiannya sendiri. Maka dari itu, negara menjadi satu-satunya pelaku perekonomian yang menguasai semua perusahaan yang ada di pasar. Kondisi perekonomian seperti ini timbul disebabkan oleh 2 hal, yaitu ketidakpercayaan penguasa terhadap mekanisme pasar dan juga karena penguasa percaya bahwa selalu terjadi konflik antara kelas pengusaha dan kelas pekerja sehingga untuk menghindari hal tersebut semua sumber perekonomian dikuasai oleh negara. Karena warga negara tidak diberikan kebebasan dalam perekonomian, maka yang dominan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka adalah negara.

Yang ketiga, aliran neoklasik mengembangkan pemikiran klasik dengan menambahkan penyediaan dan pengurusan barang publik diluar masalah kepastian hak kepemilikan dan eksternalitas. Barang publik yang dimaksud disini sudah harus berupa penyediaan sarana dan prasarana umum yang baik seperti jalan, jembatan, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, serta keamanan. Penyediaan ini diserahkan kepada negara dengan pertimbangan efisiensi. Aliran ini masih percaya pada mekanisme pasar karena dianggap dapat memberikan kepuasan pada masyarakat dengan adanya sistem kompetisi. Namun, untuk mengurangi kesenjangan dan konflik di pasar, pemerintah harus memiliki desain

kebijakan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat, seperti adanya praktik monopoli. Kebijakan ini ditempuh karena sudah mulai ada kekhawatiran aliran ini tentang ketidakseimbangan pasar jangka panjang. Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar bukan atas dasar efisiensi, akan tetapi dengan paksaan melalui desain suatu kebijakan tersebut.

Yang terakhir, Keynes mengkritik aliran klasik melalui mekanisme pasar. Keynes berpendapat bahwa suatu saat pasar akan mengalami ketidakseimbangan karena masalah yang sistemik, yaitu kegagalan mempertemukan sisi permintaan dan sisi penawaran. Penyebab kegagalan ini adalah merosotnya daya beli masyarakat sehingga terjadi kegagalan permintaan. Oleh sebab itu, Keynes menyarankan agar peran negara dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan. Akan tetapi, setelah perekonomian telah stabil, negara harus menghentikan intervensinya. Keynes hanya berfokus pada stabilitas proses produksi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek apabila tidak terjadi keseimbangan saja.

2.1.2.1 Barang Publik bagi Pembangunan

Peranan pemerintah dalam perekonomian negara sangatlah penting. Mangkoesoebroto (2001) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian modern dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu : (1) Peranan alokasi, yaitu mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien; (2) peran distribusi, yaitu mendistribusikan pendapatan maupun kekayaan secara merata yang salah satu caranya melalui mekanisme pajak; (3) peran stabilitasi, yaitu menjaga perekonomian agar tetap kondusif. Sejalan dengan peranan tersebut, Burkhead dan Miner (2009) menyatakan bahwa tujuan

ekonomi yang hendak dicapai oleh sektor publik secara garis besar terdiri atas 4 hal, yaitu : (1) mengalokasikan sumber daya dengan efisien; (2) stabilisasi kegiatan ekonomi; (3) pemerataan distribusi pendapatan; dan (4) promosi pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien, pemerintah mengambil alih hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta, seperti pengadaan barang publik. Pemerintah mengalokasikan dana untuk barang publik karena swasta gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dalam menyediakan barang tersebut (Cornes dan Sandler, 1996). Maka dari itu, Musgrave (1993) menyarankan bahwa proses politik suatu negara hendaknya digunakan untuk mengungkapkan preferensi masyarakat kepada pemerintah tentang barang publik apa yang harus disediakan serta melengkapinya dengan sumber-sumber fiskal yang dibutuhkan untuk membayar barang-barang publik tersebut.

Kehadiran barang publik menjadi salah satu cara untuk menjembatani kesenjangan kualitas hidup dalam masyarakat. Cowen (1999) menyatakan bahwa elemen barang publik terdiri dari 2, yaitu *nonexcludability* (tanpa pengecualian) dan *nonrivalrious* (tanpa persaingan). *Nonexcludability* mengacu pada ketidakmungkinan mencegah orang-orang yang tidak mengeluarkan biaya untuk menikmati keuntungan dari barang publik, dan *nonrivalrious* mengacu pada tidak berkurangnya kemampuan dan kesempatan tiap individu untuk memperoleh barang publik apabila terjadi penambahan konsumen.

2.1.2.2 Efisiensi Barang Publik

Penyediaan barang publik akan menjadi maksimal ketika jumlah dari harga yang bersedia dibayarkan oleh setiap penggunaanya sama besarnya

dengan biaya marjinal untuk memproduksi barang tersebut (Samuelson dalam Batina dan Ihori, 2005). Perbedaan barang publik dengan barang privat terletak pada kuantitas barang dan biaya yang bersedia dikeluarkan. Pada barang privat, setiap orang harus mengeluarkan jumlah uang yang sama akan tetapi bebas untuk mengkonsumsinya sesuai dengan jumlah yang diinginkan, dengan kata lain konsumen dapat menyesuaikan jumlah barang yang diinginkan dengan mempertimbangkan harga pasar. Sedangkan pada barang publik, konsumen harus mengkonsumsi jumlah barang yang sama akan tetapi dengan mengeluarkan biaya yang berbeda-beda, sesuai dengan kesediaan masing-masing konsumen.

Terdapat dua permasalahan yang timbul dari penyediaan barang publik secara efisien. Yang pertama, harus ditentukan berapa banyak biaya yang bersedia dikeluarkan oleh konsumen dalam mengkonsumsi barang publik sementara tidak ada insentif bagi konsumen yang membayar lebih. Mangkoesoebroto (2001) mengatakan bahwa akan terjadi masalah dalam menyatakan nilai kesukaan (*reveal preference*) karena apabila seseorang menyatakan nilai kesukaannya terhadap barang publik, maka ia harus membayar sebesar nilai yang ia katakan. Yang kedua, terdapat masalah dalam mendesentralisasi aturan dalam pembiayaan barang publik karena menyangkut pemilihan metode yang harus dipakai.

Samuelson menyatakan bahwa tidak ada pilihan mekanisme dalam memproduksi barang publik, sehingga tidak akan efisien apabila diproduksi oleh swasta (Holcombe, 1997). Akan tetapi, pernyataan ini kemudian diikuti oleh pertanyaan : apabila mekanisme pasar telah gagal menyediakan barang publik, dapatkah pemerintah diharapkan untuk bertindak lebih baik? Setelah itu, beberapa ahli mencoba mendesain mekanisme yang efisien untuk

mengalokasikan barang publik agar dapat mendukung teori barang publik itu sendiri sebagai dasar bagi pemerintah dalam memproduksinya.

2.1.2.3 Pembiayaan Barang Publik

Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marjinal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marjinal akan pajak yang dipungut untuk menyediakan barang publik (Mangkoesebroto, 2001). Dengan demikian, barang publik yang disediakan oleh pemerintah dapat dibiayai oleh pajak yang dipungut dari masyarakat. Pajak yang berasal dari warga negara tidak secara langsung dikompensasikan melalui kebutuhan untuk wajib pajak dalam bidang yang sama, sehingga mau tidak mau akan muncul konsumen *free rider*, yaitu konsumen yang dapat mengkonsumsi barang publik dari pajak yang dikeluarkan oleh orang lain.

Lindahl mengatakan bahwa penyediaan barang publik dapat diidentifikasi dari kontribusi setiap konsumen atas biaya produksi marjinal barang publik yang proporsional terhadap marjinal *willing to pay* atas barang tersebut. Hal ini dapat diterapkan jika konsumen dibagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga permintaan setiap kelompok dapat dihitung sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

Mangkoesebroto (2001) menjelaskan beberapa cara negara dalam menutupi defisit sebagai akibat penyediaan barang publik, yaitu : (1) pajak; (2) pungutan bagi orang yang menikmati jasa-jasa perusahaan negara penyedia barang publik; (3) diskriminasi harga; (4) mengeluarkan peraturan pemerintah tentang harga yang layak bagi produsen dan konsumen; (5) teori *second-best* melalui penyimpangan harga untuk penggunaan sumber ekonomi yang tidak optimal oleh pihak swasta; dan (6) penentuan kapasitas produksi dan harga

peak-load, yaitu penetapan harga yang berbeda atas dasar perbedaan permintaan akibat waktu yang berbeda.

2.1.2.4 Kontribusi Pengeluaran Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat datang dengan sendirinya. Dibutuhkan usaha dari berbagai pihak agar sumber daya manusia dapat menjadi berkualitas dan seragam. Usaha yang dilakukan oleh individu akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda karena perbedaan kemampuan dan juga kondisi finansialnya. Oleh karenanya, peran negara sangat dibutuhkan untuk menjembatani perbedaan antar individu ini agar diperoleh kualitas sumber daya manusia yang setara dan berada diatas standar kehidupan yang layak.

Hal yang dilakukan oleh tiap-tiap negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sangatlah beragam dan bergantung pada prioritas utama yang ingin dicapai serta juga memperhatikan kondisi masyarakatnya. Akan tetapi, secara umum langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menyediakan anggaran untuk sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan. Kedua sektor ini sangatlah penting karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia.

2.1.2.5 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan, maka pengeluaran pemerintah merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk

melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun teori-teori yang berhubungan dengan pengeluaran pemerintah adalah :

a. Adolph Wagner

Adolf Wagner (dalam Wilantari, 2012) mengeluarkan teori pengeluaran pemerintah yang dikenal dengan sebutan "*law of ever increasing activity*" (hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat). Teori ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama akan semakin meningkat. Pengamatan empiris oleh Adolph Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Ekonom Jerman ini mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan semakin meningkat. Hal ini terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Temuannya kemudian oleh Richard A. Musgrave dinamakan "hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat" (*law of growing public expenditures*).

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut adalah : (Dumairy, 1999)

1. Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
2. Kenaikan Tingkat pendapatan masyarakat
3. Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi

4. Perkembangan demokrasi
5. Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut dengan *Organic Theory of State*. Teori ini menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva ini menunjukkan bahwa secara relatif peranan pemerintah dan pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat.

b. Rostow dan Musgrave

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total-rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional – relatif besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kemudian pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya (Mangkoesoebroto, 2001).

Musgrave berpendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP semakin kecil. Pada tingkat ekonomin selanjutnya,

Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan, dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

c. Peacock dan Wiseman

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis "dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah". Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (*voting*), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang.

Menurut Peacocok-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi

dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tadi terganggu, karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*).

Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Efek ini menyatakan bahwa gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Kesadaran semacam itu menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah beroleh penerimaan yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksudkan dengan analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah (Mangkoesebroto, 2001)

2.1.3 Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Sukirno, 2004). Orang yang menganggur tersebut dapat didefinisikan orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, sedang menunggu panggilan kembali untuk suatu

pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu untuk melapor atas pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (2004), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Fator utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Pengangguran Terbuka (*open unemployment*) adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan menganggur dibagi menjadi dalam dua kelompok yaitu: (1) setengah menganggur kentara (*visible unemployment*) yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan (2) setengah menganggur tidak kentara (*invisible unemployment*) yaitu mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah.

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2006).

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan :

a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$$

b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)

- 1) Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
- 2) Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

2.1.3.1 Teori-Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pengangguran, yaitu :

a. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso. 2004).

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tohar, 2000).

b. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-

barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pengangguran

a. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sukirno, 2004) :

1) Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh.

Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

2) Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

3) Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi

permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

b. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 2004):

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang

tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Pada negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

3) Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah

menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

4) Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

2.1.3.3 Akibat Pengangguran

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek (Sukirno, 2004) dimana dua aspek tersebut yaitu :

a. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit.
- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.

b. Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :

- 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
- 2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
- 3) Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi

dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan IPM

Investasi sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat miskin. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan sumber kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut (Meier, et al, 2012).

Model Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001).

Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi

pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

2.2.3 Hubungan GDP per Kapita dan IPM

Pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat

pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator pada pembangunan manusia adalah kemampuan daya beli. Tingkat kemampuan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa menunjukkan standar kelayakan hidup masyarakat. Untuk mengukur besarnya tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah diukur dengan besarnya *GDP* per kapita. Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pula tingkat konsumsinya. Konsumsi tersebut mencakup konsumsi secara keseluruhan yang khususnya berkaitan dengan indikator pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dll).

2.2.4 Hubungan Pengangguran dan IPM

Todaro (2006) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran untuk melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan teratasinya jumlah pengangguran dan mendapatkan pendapatan yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pengurangan pengangguran

dapat kita lihat dari jumlah indeks pembangunan manusia yang mengalami peningkatan.

Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam keadaan rendahnya indeks pembangunan manusia karena tidak dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan untuk kebutuhannya. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam jangka menengah sampai jangka panjang.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang

diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran yang selama ini terjadi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 : **Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil
1	Fattah & Muji	2012	Local Government Expenditure Allocation Toward Human Development Index At Jeneponto Regency, South Sulawesi, Indonesia	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM di Jeneponto pada tahun 1998 – 2007.
2	Ginting S., Lubis, dan Mahali	2008	Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Pada 26 Provinsi di Indonesia)	Pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan non-makanan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, rasio kemiskinan, serta krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil
3	Ulas & Keskin	2017	Is There a Relation Between HDI and Economic Performances?	Menggunakan variabel tingkat pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan neraca pembayaran sebagai indikator performa ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel-variabel performa ekonomi diatas dengan indeks pembangunan manusia.
4	Abraham & Ahmed	2011	Economic Growth and Human Development Index in Nigeria: An Error Correction Model Approach	Meskipun ECM menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan jangka pendek yang negatif dengan indeks pembangunan manusia, hasilnya tidak signifikan. Koefisien untuk hubungan jangka panjang sangat signifikan. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan akan memiliki dampak negatif pada pembangunan manusia dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang, keseimbangan akan

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil
				<p>dipulihkan oleh penyesuaian HDI untuk memperbaiki kesalahan kesetimbangan. Ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah pada pembangunan manusia dan bahwa kebijakan ekonomi makro yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus dipertahankan.</p>
5	Ranis, Stewart, & Ramirez	2000	Economic Growth and Human Development	<p>Hubungan antara pertumbuhan ekonomi (EG) dan pembangunan manusia (HD) membentuk dua rantai. Regresi lintas negara menunjukkan hubungan yang signifikan di kedua arah, dengan pengeluaran publik untuk kesehatan dan pendidikan, terutama perempuan, terutama penting dalam rantai dari EG ke HD; dan tingkat investasi dan distribusi pendapatan yang signifikan dalam rantai HD ke EG. Bukti dari waktu ke waktu memiliki implikasi pengurutan yang kuat: negara-negara yang pada awalnya menyukai pertumbuhan ekonomi</p>

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil
				masuk ke dalam kategori buruk, sementara mereka yang memiliki HD yang bagus dan EG yang buruk kadang-kadang masuk ke dalam kategori baik.
6	Arisman	2018	Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries	Hasil pengolahan dengan model efek tetap menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia pada negara anggota ASEAN. Sedangkan variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak memengaruhi indeks pembangunan manusia. Penelitian ini berimplikasi pentingnya pemerintah melakukan pengendalian jumlah penduduk dan akselerasi pertumbuhan ekonominya.
7	Dewi	2017	Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan	Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Riau. Jika ada peningkatan kemiskinan sebesar 1% akan menurunkan HDI sebesar

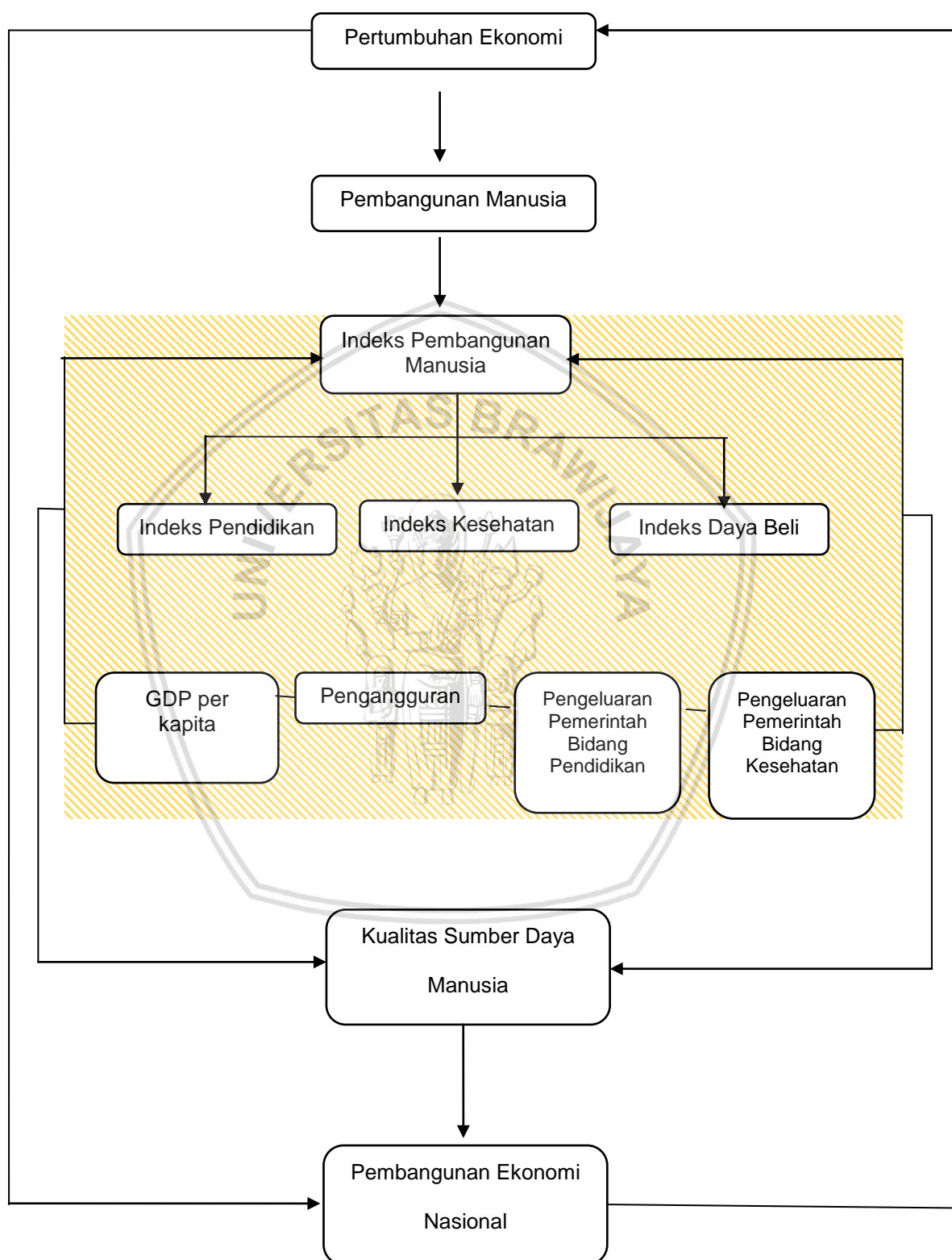
No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil
			Manusia Di Provinsi Riau	0,079% berarti setiap peningkatan kemiskinan akan menurunkan persentase IPM di Provinsi Riau. Jika terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan terjadi perubahan pada HDI sebesar 0,024% artinya setiap perubahan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi persentase IPM di Provinsi Riau.
8	Lumbantoruan & Hidayat	2013	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi)	Dengan menggunakan Tipologi Klassen, terdapat 8 provinsi yang dikategorikan sebagai provinsi cepat maju dan cepat tumbuh (kuadran I), 12 provinsi dengan kategori cepat tumbuh (kuadran II), lalu 6 provinsi dengan kategori berkembang (kuadran III), serta 7 provinsi dengan kategori terbelakang (kuadran IV). Hasil tes kointegrasi menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia.

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil
9	Maryani	2011	Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM. Meskipun berpengaruh positif pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh kecil terhadap IPM hal ini menandakan bahwa pengeluaran untuk bidang tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.

Sumber : Penelitian berbagai tahun, diolah

2.4 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : ilustrasi penulis, 2018

 : Wilayah Penelitian

Kerangka pikir penelitian pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, untuk studi kasus penelitian ini dilakukan di 6 negara-negara ASEAN. Permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia masih terjadi di negara-negara ASEAN. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh masih tingginya angka pengangguran, rendahnya pendapatan, rendahnya tingkat kesehatan, serta rendahnya tingkat pendidikan dicapai oleh masyarakat. Diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Campur tangan pemerintah bisa dilakukan dengan adanya pengeluaran publik (*public spending*). Pengeluaran publik dilakukan dengan tujuan investasi pada sumber daya manusia dengan harapan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pada masa yang akan datang.

Investasi publik di bidang pendidikan merupakan bagian dari pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi pada pendidikan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan menambah sumber daya manusia yang terampil. Meningkatnya tingkat pendidikan yang dicapai seseorang akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Mauriza (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Munawwaroh (2013) juga menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas sumberdaya manusia

Investasi publik di bidang kesehatan juga merupakan bagian dari pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi pada bidang kesehatan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang terjangkau dan merata. Meningkatnya tingkat kesehatan seseorang akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Winarti (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia.

Indikator pembangunan ekonomi seperti pendapatan per kapita serta tingkat pengangguran juga turut mempengaruhi pembangunan manusia. Peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia. Pengangguran juga dapat mempengaruhi pembangunan manusia melalui jalur pendapatan ketika angka pengangguran turun.

Melalui beberapa indikator tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia maka diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.

2.5 Hipotesis Penelitian

Didasarkan atas kerangka pikir diatas, dapat dirumuskan hipotesis sementara pada penelitian ini.. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga anggaran pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Diduga anggaran pemerintah dibidang kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Diduga GDP per kapita berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.
4. Diduga pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Menurut Yusuf (2017), penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang datanya berupa data kuantitatif dan diolah menggunakan teknik statistik. Metode kuantitatif juga dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik (Given, 2008). Sudjana dan Ibrahim (2001) menyebutkan bahwa ada dua asumsi dasar yang digunakan dalam metode kuantitatif. Dua asumsi dasar itu adalah :

1. Realitas yang dijadikan sebagai sasaran harus berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi.
2. Variabel yang digunakan dapat diidentifikasi dan diukur dengan menggunakan alat statistika.

Adapun tujuan dari metode kuantitatif adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan hipotesis, serta mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (Musianto, 2002).

3.2 Sample dan Waktu Penelitian

Sample penelitian ini adalah pada 6 negara ASEAN, yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2000 – 2015. Pemilihan keenam negara ini dikarenakan keenam negara ini termasuk dalam kategori negara dengan indeks pembangunan manusia tinggi (Malaysia,

Thailand) dan menengah (Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina) sehingga *gap* antar nilai indeks pembangunan manusianya tidak terlalu jauh. Lalu keenam negara ini juga memiliki kesamaan karakteristik, yaitu sama-sama termasuk dalam kategori negara berkembang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari World Bank, United Nations Development Programme (UNDP), internet, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang digunakan merupakan data runtun waktu (*time series*) tahunan dan juga data antar wilayah (cross-section). Data *time series* adalah sebuah kumpulan observasi terhadap nilai-nilai sebuah variable dari beberapa periode waktu yang berbeda.

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Indeks Pembangunan Manusia 6 negara ASEAN tahun 2000 - 2015
2. Data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 6 negara ASEAN tahun 2000 - 2015
3. Data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 6 negara ASEAN tahun 2000 - 2015
4. Data GDP per kapita 6 negara ASEAN tahun 2000 - 2015
5. Data tingkat pengangguran 6 negara ASEAN tahun 2000 – 2015

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk tahunan dan antar wilayah dari World Bank, dan United Nations Development Programme (UNDP).

3.5 Model Umum Penelitian

Inti dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana hubungan yang terjadi antara pembangunan ekonomi dan korupsi. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis Data Panel. Menurut Gujarati dan Porter (2008), data panel adalah kombinasi antara data *cross section* dan data *time series*. Pada analisis data panel ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model, yaitu :

1. *Pooled Least Square Models*

Metode *Pooled Least Square* mengestimasi data panel dengan menggabungkan data *cross section* dan data *time series*. Pada metode *Pooled Least Square* ini tidak memperhatikan adanya perbedaan karakteristik dalam *cross section* maupun *time series* dalam persamaannya. Adapun model persamaan pada metode *Pooled Least Square* adalah sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2008):

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

2. *The Fixed Effects Least Squares Dummy Variables (LSDV)*

Pada metode *fixed effect* memungkinkan terjadinya heterogenitas antara subjek dengan membiarkan masing – masing variabel memiliki nilai intersep yang berbeda pada setiap individu dan waktu. Seperti pada persamaan berikut (Gujarati dan Porter, 2008) :

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_n D_n + \dots + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

3. *The Random Effect Model (REM)*

Metode REM ini memiliki persamaan dengan metode *fixed effects* yaitu dengan memasukkan juga dimensi individu dan waktu. Namun, yang membedakan metode REM dengan metode *fixed effects* adalah pada metode REM ini dimasukkan juga *error term* ketika melakukan estimasi model, hal ini dilakukan karena *error term*

diasumsikan memiliki hubungan dengan dimensi individu dan waktu. Adapun model persamaannya sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2008):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.6.1 Menyiapkan Data

Sebelum melakukan analisis data, hal pertama yang wajib dilakukan adalah menyiapkan data yang akan diuji. Dalam penelitian ini data yang digunakan diambil dari beberapa sumber, yaitu www.worldbank.org, www.undp.org, dll.

3.6.2 Menentukan Persamaan

Setelah menyiapkan data, maka tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan persamaan yang akan digunakan dalam penelitian. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam penelitian ini, persamaan yang digunakan adalah :

$$\begin{aligned} IPM_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \ln (\text{GDP per kapita})_{it} + \alpha_2 \text{Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan}_{it} \\ & + \alpha_3 \text{Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan}_{it} + \alpha_4 \text{Pengangguran}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

3.6.3 Menentukan Model Terbaik

Penentuan model terbaik digunakan untuk menentukan teknik estimasi yang akan digunakan. Ada 3 teknik estimasi dalam regresi data panel yaitu, regresi dengan menggunakan metode *Pooled OLS Models*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Untuk memilih model mana yang terbaik diperlukan beberapa uji, yaitu :

1. Uji Chow

Uji Chow ini digunakan untuk menentukan apakah metode *Pooled Least Square Model* atau metode *Fixed Effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : *Pooled Least Square*

H_1 : Model FE

Untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima ada dua acara yang dapat dilakukan :

- a. Melakukan perbandingan antara perhitungan F-Tabel dan F-Statistik.

$F\text{-statistik} > F\text{-tabel} = H_0 \text{ ditolak}$

$F\text{-statistik} < F\text{-tabel} = H_0 \text{ diterima}$

Jika F-Statistik lebih besar dari F-Tabel maka H_0 ditolak, jadi model yang terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika F-Statistik lebih kecil dari F-Tabel maka model yang terbaik yang digunakan adalah *Pooled Least Square*.

- b. Melihat nilai probabilitas F

Jika probabilitas $F < \alpha$, maka H_0 ditolak. Nilai α 1%, 5%, dan 10%.

2. Uji Hausman

Uji Hausman ini digunakan untuk menentukan apakah metode *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah :

H0: Model *Random Effects*

H1: Model *Fixed Effects*

Untuk melihat hasil dari Uji Hausman ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu :

- a. Melihat nilai dari *Chi-Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , k adalah jumlah dari variabel independen. Ketika nilai statistik *Hausman* lebih besar dari nilai kritisnya maka H0 ditolak, sehingga model yang terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effects*. Sebaliknya, jika nilai statistik *Hausman* lebih kecil dari nilai kritisnya maka H0 diterima, sehingga model yang terbaik yang digunakan adalah model *Random Effects*.
- b. Melihat nilai probabilitas *Chi – Square Statistics*.

Jika nilai probabilitas *Chi – Square Statistics* $< \alpha$, maka H0 ditolak. Sehingga model yang digunakan adalah model *fixed effect*.

3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji Langrange Multiplier ini digunakan untuk menentukan apakah metode *Pooled Least Square Model* atau *random effect* yang terbaik dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah :

H0: *Pooled Least Square*

H1: Model *Random Effect*

Untuk melihat hasil Uji Langrange Multiplier dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Melihat nilai *Chi - Square Statistic* hitung dan *Chi - Square Statistic* tabel.

Jika nilai *Chi - Square Statistic* hitung $>$ *Chi - Square Statistic* tabel, maka H_0 ditolak, sehingga model yang digunakan adalah model *random effect*.

- b. Melihat nilai probabilitas *Chi – Square*. Jika nilai probabilitas *Chi – Square* $< \alpha$, maka H_0 ditolak. Sehingga model yang digunakan adalah model *random effect*.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Setelah melakukan estimasi terhadap model, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menguji apakah persamaan – persamaan tersebut memiliki kesesuaian dengan asumsi regresi Klasik. Adapun uji asumsi Klasik yang dilakukan adalah Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Normalitas (Yuliadi, 2008).

1. Uji Multikolineritas

Multikolinearitas diartikan sebagai adanya hubungan (korelasi) linier yang terjadi diantara variabel independen dalam model (Gujarati dan Porter, 2008). Untuk menguji adakah multikolinearitas dalam model dapat menggunakan tes koefisien korelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Jika nilai koefisien korelasi $< 0,80$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut tidak memiliki hubungan dengan variabel independen lainnya.

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varian dari residual dalam sebuah model regresi linear (Gujarati dan Porter, 2008). Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai residual dari model tidak memiliki varians yang konstan. Gejala ini sering terjadi pada data *cross section*, sehingga sangat dimungkinkan terjadi heteroskedastisitas pada data panel.

Deteksi Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Heteroskedastisitas terjadi jika nilai residual dari model tidak memiliki varians yang konstan. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah uji Breusch-Pagan-Godfrey. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilihat dari probabilitas Chi-square dari $Obs \cdot R\text{-squared}$. Jika nilai probabilitas $> \alpha$ maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu dari periode tertentu (ϵ_t) dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya (ϵ_{t-1}) (Gujarati dan Porter, 2008). Untuk menentukan apakah terdapat masalah autokorelasi atau tidak, maka dilakukan uji Durbin - Watson. Untuk melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak, maka dilakukan perlu dilakukan perbandingan nilai uji Durbin - Watson dengan nilai tabel Durbin – Watson. Berikut adalah penentuan apakah terjadi autokorelasi atau tidak :

- a. Jika $d < d_l$, berarti terdapat autokorelasi positif
- b. Jika $d > (4 - d_l)$, berarti terdapat autokorelasi negatif

- c. Jika $d_u < d < (4 - d_l)$, berarti tidak terdapat autokorelasi
- d. Jika $d_l < d < d_u$ atau $(4 - d_u)$, berarti tidak dapat disimpulkan

Deteksi Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. (Ghozali, 2006).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM. Jika nilai probabilitas $Obs^* R\text{-square}$ lebih dari $> \alpha 5\%$, maka tidak terdapat masalah autokorelasi.

4. Uji Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006).

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah residual dalam model regresi mengikuti sebaran normal atau tidak. Model yang baik adalah model dimana residualnya mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan dalam menguji normalitas adalah Jarque-Bera. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila nilai probabilitas uji lebih besar dari $\alpha 5\%$.

3.6.5 Uji Statistik

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien determinasi (R^2), pengujian signifikansi simultan (uji F), dan pengujian signifikansi individu (uji t).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2006).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik. Dalam kenyataan nilai adjusted R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2010) jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka adjusted $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka adjusted $R^2 = (1 - k)/(n - k)$. Jika $k > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai negatif.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 > 0$, artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F\text{-hitung} = R^2 / (K-1) (1-R^2) / (N-K)$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = Jumlah observasi

Kriteria pengambilan keputusan :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3. Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

i. Uji t untuk variabel GDP per kapita (GDPpc)

- a) $H_0 : \beta_2 \geq 0$ (tidak ada pengaruh antara GDP per kapita dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)
- b) $H_1 : \beta_2 < 0$ (ada pengaruh positif antara GDP per kapita dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)

ii. Uji t untuk variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (PPendidikan)

- a) $H_0 : \beta_1 \leq 0$ (tidak ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)
- b) $H_1 : \beta_1 > 0$ (ada pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)

iii. Uji t untuk variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (PPKesehatan)

- a) $H_0 : \beta_1 \leq 0$ (tidak ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)
- b) $H_1 : \beta_1 > 0$ (ada pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)

iv. Uji t untuk variabel pengangguran (Pengangguran)

- a) $H_0 : \beta_3 \leq 0$ (tidak ada pengaruh antara pengangguran dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)
- b) $H_1 : \beta_3 > 0$ (ada pengaruh negatif antara pengangguran dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Adapun rumus untuk mendapatkan t hitung adalah sebagai berikut :

$$t\text{-hitung} = b_i - b_{sbi} \quad (3.3)$$

Dimana : b_i = koefisien variabel independen ke-i

b = nilai hipotesis nol

s_{bi} = simpangan baku dari variabel independen ke- i

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang dijelaskan secara operasional, praktik, dan nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Memberikan definisi pada variabel penelitian sangat penting untuk dilakukan agar terhindar dari penyimpangan dan kesalahan pada saat proses pengumpulan data (Muninjaya, 2003). Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.7.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu : (1) Indeks Harapan Hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; (2) Indeks Pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; (3) Indeks Pendapatan, yang diukur dengan daya beli konsumsi per kapita. Indeks Pembangunan Manusia dinyatakan dalam angka 0-1 dimana semakin mendekati angka 1 maka semakin baik tingkat pembangunan manusianya.

3.7.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (PPendidikan) adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang mencerminkan total pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dinyatakan dalam pengeluaran pemerintah bidang pendidikan per kapita (US\$/ jiwa).

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (PPKesehatan) adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan yang mencerminkan total pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dinyatakan dalam pengeluaran pemerintah bidang kesehatan per kapita (US\$/ jiwa).

3.7.3 GDP per Kapita

GDP per kapita merupakan hasil bagi antara GDP dengan jumlah populasi setiap negara pada keenam negara ASEAN tahun 2000 hingga 2015 (US\$/ jiwa).

3.7.4 Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Sukirno, 2004). Orang yang menganggur tersebut dapat didefinisikan orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, sedang menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu untuk melapor

atas pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu. Dalam penelitian ini variabel pengangguran direpresentasikan oleh presentase pengangguran total dari jumlah total tenaga kerja (%).



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan indeks pembangunan manusia, dapat diamati perkembangan manusia dari sisi ekonomi maupun sisi sosial, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator bagi pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Indeks pembangunan manusia di beberapa negara ASEAN dapat dilihat pada grafik berikut.

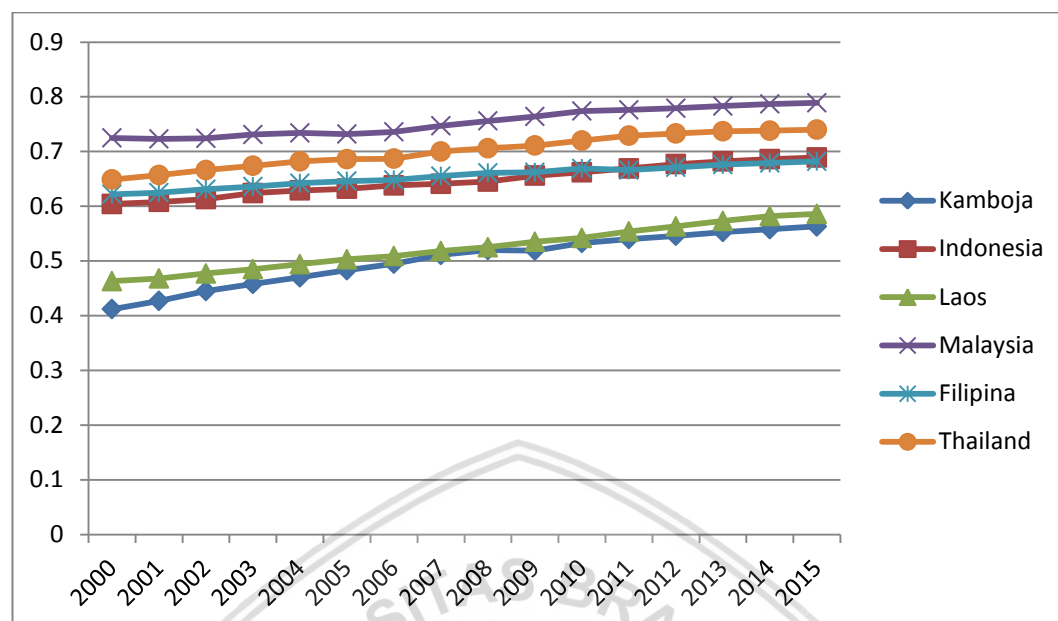
Grafik 4.1 menunjukkan tentang nilai IPM pada beberapa negara ASEAN dalam kurun waktu 16 tahun, yaitu mulai tahun 2000 hingga tahun 2015. Beberapa negara ASEAN tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Laos, dan Kamboja. Pada grafik 4.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, indeks pembangunan manusia di beberapa negara ASEAN mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Nilai IPM keenam negara mengalami kenaikan setiap tahunnya selama tahun 2000 hingga tahun 2015. Kenaikan nilai IPM ini menunjukkan bahwa terdapat progress yang hampir sama selama kurun waktu tersebut dalam pengembangan sumber daya manusia pada setiap negara. Hal ini dapat dilihat melalui kurva nilai IPM keenam negara yang hampir sejajar.

Walaupun demikian, dari keenam negara sampel ini terdapat 2 negara yang termasuk dalam kelompok dengan IPM tinggi dan 4 negara yang termasuk dalam kelompok dengan IPM menengah. Malaysia dan Thailand merupakan negara yang termasuk dalam kelompok IPM tinggi. Malaysia menempati urutan 59 di dunia dengan nilai IPM sebesar 0,789 pada tahun 2015. Sedangkan Thailand menempati urutan 87 di dunia dengan nilai IPM sebesar 0,740 pada tahun yang sama. Angka harapan hidup pada kedua negara tersebut adalah 74,9 tahun untuk negara Malaysia dan 74,6 tahun untuk Thailand. Sedangkan rata-rata lama sekolah untuk Malaysia adalah 10,1 tahun dan 7,9 tahun untuk Thailand.

Kelompok IPM menengah dihuni oleh negara Indonesia, Filipina, Laos, dan Kamboja yang masing masing menempati urutan ke 113 (nilai IPM 0,689), 116 (nilai IPM 0,682), 138 (nilai IPM 0,586), serta 143 (nilai IPM 0,563) pada tahun 2015. Pencapaian keempat negara ASEAN ini setara dengan pencapaian pencapaian IPM negara-negara Amerika Selatan dan sedikit diatas negara-negara di Afrika. Angka harapan hidup tertinggi pada kelompok ini dipegang oleh negara Indonesia dengan 69,1 tahun lalu disusul oleh Kamboja dengan 68,8 tahun, lalu dilanjutkan oleh Filipina dengan 68,3 tahun, dan yang terakhir adalah Laos dengan angka harapan hidup yang hanya mencapai 66,6 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah masing-masing negara adalah Filipina 9,3 tahun, Indonesia 7,9 tahun, Laos 5,2 tahun, dan Kamboja dengan 4,7 tahun.

Gambar 4.1 : Perkembangan IPM di Beberapa Negara ASEAN



Sumber : Human Development Report, 2016

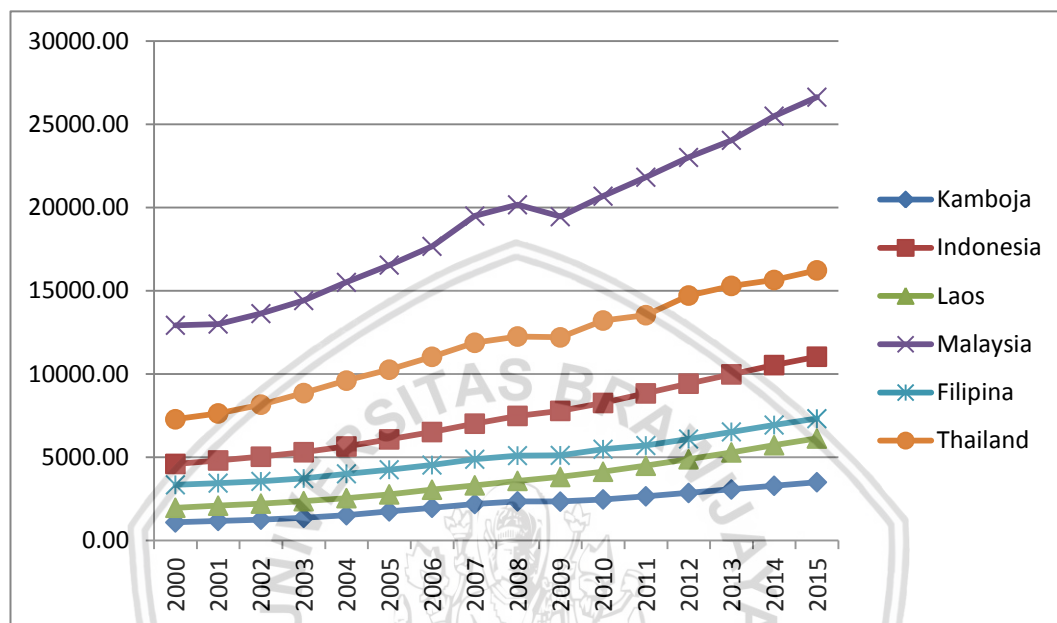
4.1.2 Perkembangan Pendapatan Per Kapita

Grafik 4.2 menyajikan data mengenai perkembangan pendapatan per kapita pada keenam negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Laos dan Kamboja. Tabel ini menjelaskan perkembangan pendapatan per kapita selama 16 tahun, mulai tahun 2000 hingga tahun 2015. Secara keseluruhan, dapat kita lihat bahwa pendapatan per kapita pada keenam negara ASEAN mengalami peningkatan yang cukup konstan setiap tahunnya. Progress yang dilakukan di keenam negara hampir sama, hal ini ditunjukkan dengan kurva peningkatan pendapatan per kapita pada keenam negara yang hampir sejajar.

Pendapatan per kapita tertinggi masih dipegang oleh negara Malaysia dengan gap yang cukup jauh dengan negara-negara lain. Sedangkan negara dengan pendapatan per kapita terendah negara Kamboja. Keenam negara di

ASEAN ini mengalami peningkatan pendapatan per kapita sebesar 5-8% setiap tahunnya selama tahun 2000 hingga 2015.

Gambar 4.2 : **Perkembangan Pendapatan per Kapita di Beberapa Negara ASEAN**



Sumber : World Bank, 2018

4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran publik merupakan pengeluaran yang harus dialokasikan setiap negara dalam rangka penyediaan barang dan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengalokasian pengeluaran publik berbeda-beda bagi setiap negara bergantung kepada kondisi setiap negara dan juga kebijakan pemerintahannya, yang disesuaikan dengan prioritas dan juga kondisi masyarakatnya. Sektor utama yang menjadi perhatian setiap negara biasanya terdiri dari sektor-sektor yang dapat memberikan kontribusi lebih dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pendidikan dan juga

sektor kesehatan. Sektor-sektor inilah yang diharapkan mampu mendorong pembangunan sumber daya manusia di negara tersebut.

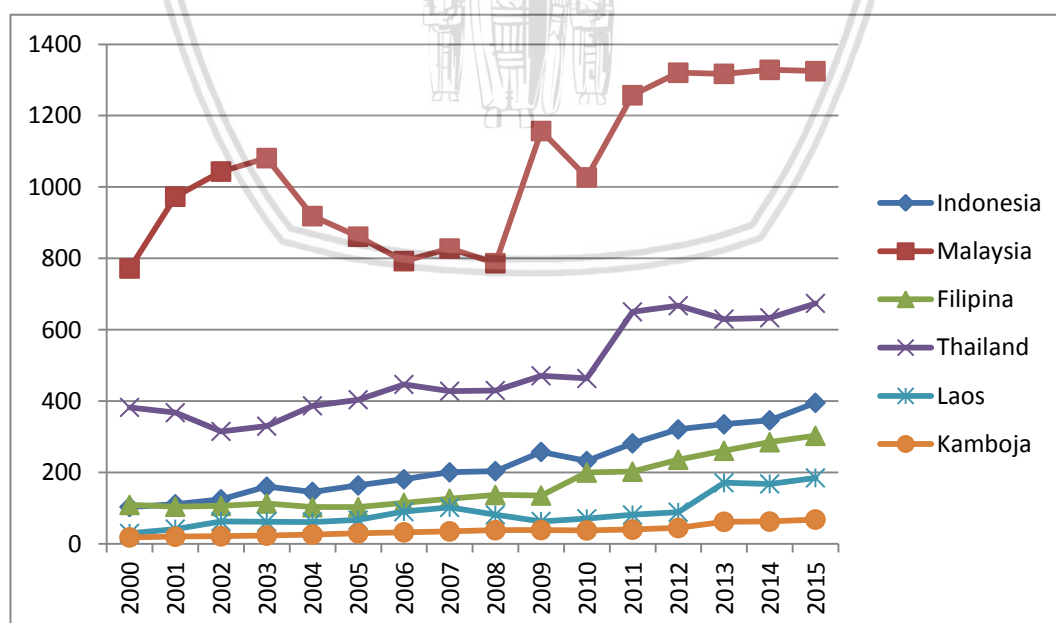
Besarnya usaha negara-negara ASEAN dalam pembangunan sumber daya manusia terlihat dari pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang rata-rata meningkat setiap tahunnya dalam periode waktu antara tahun 2000 hingga 2015 ini. Kenaikan ini tentunya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.

Pengeluaran pendidikan per kapita yang dialokasikan keenam negara di ASEAN pada kurun waktu tahun 2000 hingga 2015 menunjukkan trend yang meningkat, seperti terlihat dari grafik 4.3 dibawah. Malaysia mengalokasikan pengeluaran pendidikan yang paling besar yaitu lebih dari tiga kali lipat dari negara lainnya. Peningkatannya juga tajam walaupun ada penurunan di beberapa tahun. Sedangkan kelima negara lainnya kurvanya cenderung lebih landai dengan kenaikan yang tidak terlalu besar.

Besarnya pengeluaran pendidikan di Malaysia dialokasikan untuk membiayai dua kementerian yang menangani masalah pendidikan, yaitu *Ministry of Education* yang mengelola masalah pendidikan pra sekolah, *primary level*, dan *secondary level*, serta *Ministry of Higher Education* yang menangani khusus masalah perguruan tinggi. Hal ini senada dengan keadaan di Indonesia. Di negara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelola masalah pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi khusus mengelola masalah perguruan tinggi.

Pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan paling tinggi adalah negara Malaysia yang dapat dilihat dari *student to teacher ratio* , yaitu rasio antara guru dan murid adalah 13 : 1, yang artinya 1 orang guru hanya menangani 13 orang murid. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien karena guru menjadi lebih terfokus dan murid dapat lebih mudah pembelajarannya. Kebalikan dari negara Malaysia adalah negara Kamboja yang pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikannya paling kecil diantara negara-negara yang lainnya. Hal ini dapat terlihat dari rasio antara murid dan guru yang mencapai 49 : 1, yang artinya 1 orang guru harus menangani 49 orang. Hal ini menyebabkan guru kurang fokus pada pengajarannya karena banyaknya murid yang harus ditangani. Rata-rata lama sekolah di negara-negara ASEAN adalah 12 tahun, yang terdiri dari 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas.

Gambar 4.3 : Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan per Kapita di Beberapa Negara ASEAN

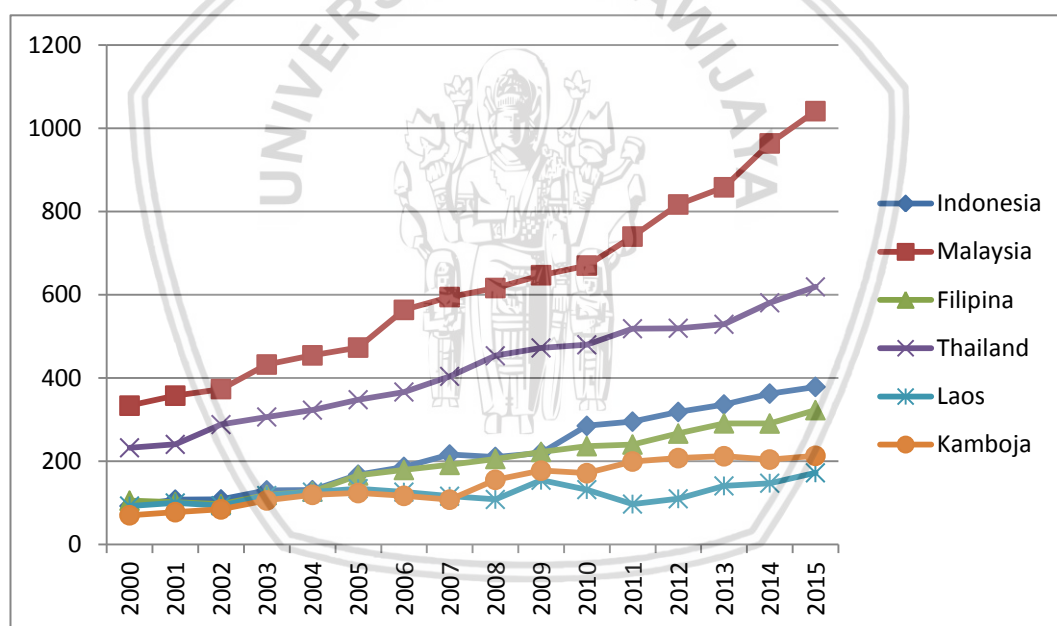


Sumber : Worldbank, 2018 (diolah)

4.1.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Mempunyai pola yang sama dengan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2000 hingga tahun 2015 untuk keenam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga Laos. Malaysia dan Thailand mengalami peningkatan yang cukup tajam, sedangkan keempat negara lain peningkatannya masih kecil, bahkan ada penurunan di beberapa tahun seperti terlihat pada grafik 4.4 dibawah.

Gambar 4.4 : **Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan per Kapita di Beberapa Negara ASEAN**



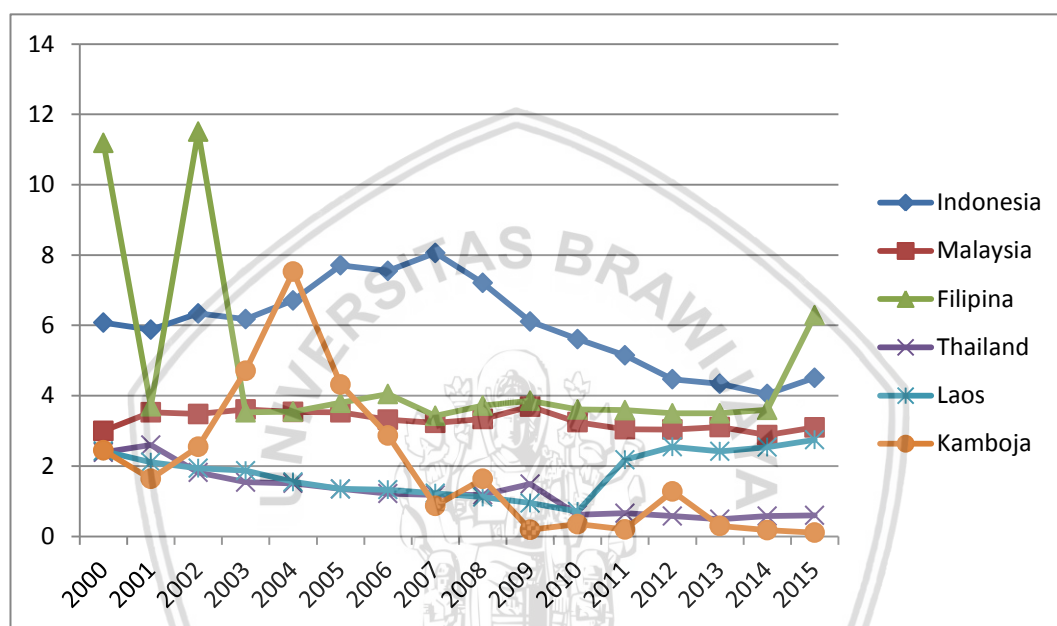
Sumber : Worldbank, 2018 (diolah)

4.1.5 Perkembangan Pengangguran

Pengangguran di keenam negara ASEAN sejak tahun 2000 hingga tahun 2015 mengalami siklus naik turun yang cukup drastis. Naik turunnya angka pengangguran di beberapa negara ASEAN dapat dilihat pada grafik 4.5. Kurva

yang menunjukkan naik turunnya tingkat pengangguran yang paling drastis terjadi di negara Filipina dan Kamboja. Sedangkan pada negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Laos menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat pengangguran setiap tahunnya, walaupun ada peningkatan di beberapa tahun.

Gambar 4.5 : **Perkembangan Pengangguran di Beberapa Negara ASEAN**



Sumber : Worldbank, 2018

4.2 Hasil Estimasi dan Pengujian Hipotesis

4.2.1 Menentukan Model Terbaik

Dalam analisis data panel dikenal ada tiga metode yang digunakan untuk mengestimasi model. Tiga metode tersebut adalah *Pooled Least Square*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Untuk menentukan metode yang akan digunakan, maka perlu dilakukan tiga uji, yaitu uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier. Berikut adalah hasil dari ketiga uji tersebut.

4.2.1.1 Hasil Uji Chow

Uji Chow adalah uji yang digunakan untuk menentukan antara metode *Pooled Least Square* atau metode *Fixed Effect* yang terbaik. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah :

H_0 : *Pooled Least Square*, H_1 : *Fixed Effect*.

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada lampiran 1, menunjukkan bahwa probabilitas nilai F adalah 0.0000, yang berarti bahwa nilai probabilitas $F < \alpha$ 5%, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

4.2.1.2 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji yang digunakan untuk menentukan antara model *Fixed Effect* ataukah *Random Effect* yang terbaik. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji hausman adalah :

H_0 : *Random Effect* , H_1 : *Fixed Effect*.

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada lampiran 2, menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Chi-Square* adalah 0.0078, yang berarti bahwa nilai probabilitas *Chi Square* $< \alpha$ 5%, maka H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

4.2.2 Hasil Uji Kriteria Statistik

4.2.2.1 Hasil Uji Signifikansi Serentak (F – test)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara serentak. Jika nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel atau probabilitas F hitung yang lebih kecil

α 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen di dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat dalam lampiran 3, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (F-statistic) adalah 0,000000 yang berarti lebih kecil dari α 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu GDP, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, serta pengangguran secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, yaitu indeks pembangunan manusia.

4.2.2.2 Hasil Uji Signifikansi Parsial (*t – test*)

Uji t adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah setiap variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik hasil perhitungan (*t*-hitung) dengan nilai *t*-tabel pada derajat kepercayaan ($\alpha = 5\%$). Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara melihat probabilitas nilai *t-statistic* masing-masing variabel. Apabila probabilitas *t-statistic* dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari α 5%, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat dalam lampiran 3, dapat dilihat bahwa terdapat 3 variabel yang memiliki probabilitas *t-statistic* kurang dari α 5%, yaitu variabel gdp per kapita dengan probabilitas 0,0000; variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan probabilitas 0,0440; serta variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan per kapita dengan probabilitas 0,0201. Sedangkan variabel pengangguran memiliki probabilitas *t-statistic* lebih dari α 5%, yaitu mempunyai probabilitas 0,8883. Sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa variabel gdp, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4.2.2.3 Hasil Uji *Goodness of Fit* (*R-squared*)

Uji R-squared adalah uji yang digunakan untuk melihat seberapa besar variasi nilai dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel independen. Nilai R-squared berkisar antara 0 dan 1. Berdasarkan hasil uji yang terdapat dalam lampiran 3, diperoleh nilai R² sebesar 0,996068 atau 99,60% sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model persamaan tersebut dapat menjelaskan pengaruh gdp, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, serta pengangguran sebesar 99,60% dan sisanya sebesar 0,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model persamaan tersebut.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Setelah model dari penelitian ini diregresi dengan menggunakan metode regresi data panel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat model yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan.

4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah residual dalam model regresi mengikuti sebaran normal atau tidak. Model yang baik adalah model dimana residualnya mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan dalam menguji normalitas adalah Jarque-Bera. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila nilai probabilitas uji lebih besar dari α 5%. Berdasarkan hasil uji yang terdapat pada lampiran 4, diperoleh nilai probabilitas uji sebesar 0,301830, sehingga dapat disimpulkan bahwa data menyebar normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

4.2.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk melihat adanya hubungan diantara variabel independen dalam suatu persamaan. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Jika nilai koefisien korelasi $<0,80$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut tidak memiliki hubungan dengan variabel independen lainnya.

Berdasarkan hasil uji yang terdapat pada lampiran 5, dapat diketahui bahwa semua nilai koefisien korelasi memiliki nilai $<0,80$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat hubungan diantara variabel independennya.

4.2.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang melihat apakah ada ketidaksamaan dalam varian dari residual dalam sebuah model regresi (Gujarati dan Porter, 2008). Heteroskedastisitas terjadi jika nilai residual dari model tidak

memiliki varians yang konstan. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah uji Breusch-Pagan-Godfrey.

Berdasarkan hasil uji yang terdapat pada lampiran 6, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas untuk semua variabel memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut tidak terdapat adanya kecenderungan heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat dari probabilitas Obs* R_square. Jika probabilitas Obs* R_square lebih dari α 5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Dari uji tersebut juga diketahui bahwa nilai probabilitas Obs* R_square sebesar 0,0712 $>$ dari α 5% sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.2.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang melihat apakah ada hubungan diantara kesalahan pengganggu dari periode tertentu (ϵ_t) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (ϵ_{t-1}). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM. Jika nilai probabilitas Obs* R_square lebih dari $> \alpha$ 5%, maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Berdasarkan hasil uji pada lampiran 7, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Obs* R_square adalah 0,0674 $> \alpha$ 5%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat adanya autokorelasi pada data tersebut.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh GDP Per Kapita terhadap IPM

Hubungan antara GDP per kapita dan IPM diperkirakan positif. Di keenam negara ASEAN, hubungan antara GDP per kapita dan IPM menunjukkan hasil

yang positif dan signifikan. Semakin tinggi GDP per kapita suatu negara maka akan meningkatkan nilai IPM negara tersebut. Semakin tinggi GDP per kapita suatu negara maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangga di negara tersebut dan selanjutnya akan meningkatkan daya beli rumah tangga tersebut. Ketika daya beli rumah tangga meningkat, maka peningkatan daya beli tersebut dapat dialokasikan kepada pembelian makanan yang bergizi, biaya pendidikan, maupun biaya kesehatan. Hal ini akan meningkatkan angka harapan hidup dan angka melek huruf di dalam rumah tangga tersebut. Yang nantinya hal ini akan turut meningkatkan nilai IPM di negara tersebut.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2013) yang menemukan bahwa hubungan positif antara GDP per kapita dan IPM akan semakin melemah pada level pendapatan yang semakin tinggi. Shah (2016) juga mengemukakan bahwa faktor penentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia diantaranya adalah GDP per kapita, angka melek huruf, indeks gini, angka kelahiran, serta emisi Co2. Lalu, Bintang et al. (2015) yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia pada negara OIC juga menyatakan bahwa pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, serta indeks gini akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan IPM.

4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM

Hubungan antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan IPM diperkirakan positif. Berdasarkan hasil uji diatas, pada keenam negara ASEAN, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Semakin banyak pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, maka akan semakin tinggi pula nilai indeks pembangunan manusia di negara tersebut.

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan pada keenam negara ASEAN ternyata dapat memberikan manfaat positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal ini dilandasi oleh pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini sesuai dengan teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat yang disebabkan oleh adanya peningkatan fungsi kesejahteraan masyarakat dan fungsi pembangunan.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan IPM diperkirakan positif. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan diatas, pada keenam negara ASEAN, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk bidang kesehatan akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia di negara tersebut.

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan pada keenam negara ASEAN ternyata dapat memberikan manfaat positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal ini dilandasi oleh pentingnya peran kesehatan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini sesuai dengan teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat yang disebabkan oleh adanya peningkatan fungsi kesejahteraan masyarakat dan fungsi pembangunan.

Aliran neoklasik menganjurkan agar penyediaan barang publik dilakukan oleh negara karena pihak swasta tidak dapat menyediakan barang publik secara efisien. Hal tersebut dilakukan oleh keenam negara ASEAN, walaupun dengan porsi yang berbeda-beda. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan pada keenam negara ASEAN sebagian besar digunakan untuk menyediakan

pendidikan dasar bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan, pendidikan dasar merupakan derajat pendidikan yang paling penting serta keengganan pihak swasta memasuki area ini karena masalah efisiensi. Begitu juga pada bidang kesehatan, keenam negara ASEAN ini berfokus pada penyediaan kesehatan primer dan penyediaan kesehatan bagi kalangan tidak mampu.

Alokasi pada bidang pendidikan dan kesehatan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada masyarakat. Melalui alokasi pendidikan, dapat menambah kapabilitas individu, pengetahuan, maupun keterampilan yang nantinya akan menciptakan peluang terjadinya inovasi, kreatifitas, maupun teknologi-teknologi baru. Dengan bermodalkan hal tersebut, masyarakat dapat mendapat pekerjaan yang lebih baik, bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dengan demikian, maka pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat. Ketika pendapatan per kapita masyarakat meningkat maka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia.

Mekanisme yang sama juga terjadi pada alokasi bidang kesehatan. Dengan adanya alokasi untuk masyarakat pada bidang kesehatan, maka masyarakat akan dengan mudah mengakses kesehatan dan akan memiliki peningkatan gizi serta nutrisi sehingga ketahanan fisik masyarakat akan meningkat. Ketika ketahanan fisik meningkat, maka hal tersebut akan meningkatkan angka harapan hidup di masyarakat yang nantinya juga akan berpengaruh pada peningkatan nilai indeks pembangunan manusia.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhakti (2014) yang menyatakan bahwa PDRB, APBD untuk pendidikan, serta APBD untuk kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia pada periode tahun 2008 hingga 2012. Aviyati dan Susilo (2013) juga mengatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur pada

periode tahun 2007 hingga tahun 2012, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur dan pertumbuhan populasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4.3.3 Pengaruh Pengangguran terhadap IPM

Hubungan antara pengangguran dan IPM diperkirakan negatif. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan diatas, pada keenam negara, pengangguran mempunyai hasil yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini disebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap secara maksimal. Hubungan antara pengangguran terhadap IPM tidak signifikan karena data pengangguran yang digunakan tidak konsisten dan mempunyai banyak outlier yang disebabkan karena adanya krisis ekonomi.

Penelitian ini membantah penelitian Arisman (2018) yang menyatakan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif walaupun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji determinan indeks pembangunan manusia di beberapa negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Laos selama periode tahun 2000 hingga tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *GDP* per kapita mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti kenaikan *GDP* per kapita dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pendapatan per kapita (*GDP* per kapita) mempengaruhi indeks pembangunan manusia melalui peningkatan daya beli yang dapat dialokasikan untuk pembelian makanan bergizi, biaya pendidikan, maupun biaya kesehatan.
2. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia melalui peningkatan kapabilitas dan pengetahuan masyarakat yang akan membuat masyarakat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga akan menaikkan pendapatan per kapita.
3. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini

menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mempengaruhi indeks pembangunan manusia melalui peningkatan gizi dan ketahanan fisik sehingga akan meningkatkan angka harapan hidup.

4. Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

5.2 Saran

Dari ulasan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di beberapa negara ASEAN antara lain :

1. Perlu diadakan peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan juga kesehatan. Akan tetapi, pemerintah menghadapi kendala anggaran, maka hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Perlu meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dengan mengadakan shifting dari anggaran untuk pengeluaran administratif menjadi anggaran untuk pengeluaran publik.
 - b. Meningkatkan efektifitas anggaran dengan penajaman perencanaan alokasi anggaran yang teratur. Hal tersebut dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan anggaran berbasis kinerja yang logis sehingga dapat mencapai target, hingga tahap pelaksanaan dan pengawasan agar tidak melenceng dari target awal.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mampu penelitian dengan data terbaru yang lebih lengkap serta mencakup seluruh negara di kawasan ASEAN agar hasil yang didapat lebih baik. Selain itu, peneliti selanjutnya

juga diharapkan mampu menambah variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Terfa Williams, dan Umar Abdullahi Ahmed. 2011. Economic Growth and Human Development Index in Nigeria : An Error Correction Model Approach. *Economic Journal*.
- Aimon, Hasdi. 2012. Pengaruh Produktifitas Investasi Sumber Daya Manusia, Investasi Fisik, Kesempatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Anggraheni, Yesi. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi UIN*.
- Arisman 2018 - Arisman. 2018. Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 7 (1) hal 113-122. P-ISSN : 2087 – 2046. E-ISSN : 2467 – 9223.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Aviyati, Syivai dan Susilo. 2016. Analisis Pengaruh Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang*.
- Baeti, Nur. 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhaap Pembangunan Manusia KabupatenKota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal UNNES* ISSN 2252-6889.
- Batina, R.G., Ihori, T. 2005. *Public Goods Theories and Evidance*. Berlin: Springer.
- Bhakti, Nadia Ayu dan Istiqomah. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2010. *Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. ISSN 1411-0393.
- Bintang, M., Ismail, N. & Indra. 2015. Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan Maqasid Syariah Al-Ghazali: Studi Kasus: Negara-Negara OKI (Determinant of Human Development Index Based on Al-Ghazaly Maqashid Shariah Approach: Case in OIC Countries). *Eksyar*. Vol. 2, No. 2, hal. 512-534.
- Caporaso, James A dan David P. Levine. 1992. *Theories of Political Economy*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Case, Karl E. & Fair, Ray C.. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Edisi Kedelapan, Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.
- Cornes, R. dan Sandler, T. 1996. *The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods Second Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Dewi, Novita. 2017. Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *JOM Fekom*. Vol. 4, No.1, hal. 870-882.
- Dianaputra, I.G.K.A., & Aswitari, L.P. 2017. Pengaruh Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 6 (3): 115-146.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. 2011. *Ayo Kita Kenali Asean*. Jakarta : Bagian Penerbitan Kementerian Luar Negeri RI.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Erlangga.
- Ehrenberg, R.G. & Smith, R.S.. 2003. *Modern Labor Economics : Theory and Public Policy, Eighth Edition*. New York City : Pearson Education, Inc.
- Eren, Mirac, Ali Kemal Celik, Arif Kubar. 2014. Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index: A Comparison of Regression Models for Limited Dependent Variables. *Rview of European Studies*. Vol. 6, No. 1. ISSN 1918-7173
- Fattah, Sanusi & Aspa Muji. 2012. Local Government Expenditure Allocation Toward Human Development Index at Jeneponto Regency, South Sulawesi, Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Keempat*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ginting S, Charisma Kuriata, Irsad Lubis, and Kasyful Mahalli. 2008. Human Development in Indonesia and Factors Affecting. *Journal of Planning and Regional Development*. Vol.4, No.1, August 2008. Page 17-24
- Given, Lisa M. (Editor). 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. California : Sage-Thousand Oaks.
- Global Education Monitoring Report. 2016. *Education for People and Planet : Creating Sustainable Futures for All*.
- Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C.. 2008. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Hasan, Z. 2013. Determinants of Human Resource Development: An Empirical Analysis. *International Journal of Economics, Management, and Accounting*. Vol. 8 (2).
- Holcombe, R.G. 1997. The Theory of Public Goods. *Review of Austrian Economics*. Vol 10, No 1. Page 1-22.
- Kaufman, Peter. 2003. Learning To Not Labor : How Working-Class Individuals Construct Middle-Class Identities. *The Sociological Quarterly*. Vol. 44/ No. 3.

- Kpolovie, P.J., Ewansiha, S., & Esara, M. 2017. Continental Comparison of Human Development Index. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*. Vol. 4(1): 23-34.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Salemba Empat
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : Erlangga
- Lumbantoruan, Eka Pratiwi, dan Paidi Hidayat. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik, Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPFE.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta : Erlangga
- Maryani, Tri. 2011. Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 14, No. 3.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009. *Jurnal Ekonomi*. Hal 1-15.
- Munawawaroh. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perekonomian Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Musgrave, R.A.1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Edisi Kelima*. Alih Bahasa oleh Alfonso Sirait, dkk. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Prasetyo, P. Eko. 2009. The Quality of Growth : Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. Vol.1, No.1.
- Ranis, Gustav, Frances Stewart, Alejandro Ramirez. 2000. Economic Growth and Human Development. *World Development*. Vol. 28, No. 2, pp. 197-219.
- Sarkar, Md. Sujahangir Kabir, Sumaiya Sadeka, Md. Mehedi Hasan Sikdar. 2012. Human Development Scenario of Malaysia: ASEAN and Global Perspective. *Asian Journal of Applied Science and Engineering*. Volume 1, No 1. ISSN 2305-915X
- Shah, S. 2016. Determinant of Human Development Index: A Cross-Country Empirical Analysis. *Munich Personal RePEc Archive (MRPA) Paper No. 73759*.
- Singariya, M.R. 2014. Socioeconomic Determinant of Human Development Index in India. *Management and Administrative Sciences Review*. Vol. 3 (1): 69-84.

- Solfida, E., Hermiyanti, P., & Hamzah, M.Z. 2015. Determinant Variable Analysis of Human Development Index in Indonesia: Case for High and Low Index at Period 2004-2013. *International Journal of Sustainable Development*. Vol. 8(9): 11-27.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Kebijaksanaan*. Jakarta : LPFE-UI
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmono. 2004. *Pengantar Ekonomi Makro : Teori, Soal, dan Penyelesaiannya*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- The ASEAN Secretariat Jakarta. 2014. *Asean State of Education Report 2013*. Jakarta : ASEAN Secretariat.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C.. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Ulas, Efehan & Keskin, Burak. 2017. Is There a Relation Between HDI and Economic Performance. *Research Gate*.
- United Nation Development Program. 1995. *Human Development Report*.
- Widodo, Adi, dkk. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol 1. Hal. 25-42.
- Winarti, Astri. 2013. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Periode 1992-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Yonk, Ryan M. Dan Reilly Shauna. 2011. Applied Research Quality of Life, Citizen Involvement & Quality of Life: Exit, Voice and Loyalty in a Time of Direct Democracy. DOI 10.1007/s11482-011-9142-x.
- Yuliadi, Imamudi. 2008. *Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- Yuliani, T., & Saragih, N. 2014. Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK: Journal of Economics and Policy*. Vol. 7 (1) : 60-72.